

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- 1) Susunan dan posisi pemerintahan daerah tersebut juga menggambarkan hubungan di antara pemerintahan daerah, yang dalam konteks Indonesia, adalah hubungan antara Unit Dasar (kabupaten/kota) dan Unit Antara (provinsi). Selama ini konsep tentang unit dasar dan unit antara ini masih ambigu dalam tataran pelaksanaannya. Padahal penegasan konsep tersebut merupakan sebuah prasyarat untuk membentuk sistem pemerintah daerah yang baik.
- 2) Pola pemilihan kepemimpinan dalam satu paket tetapi berasal dari unsur partai terbukti menimbulkan rivalitas. Di tingkat daerah rivalitas kepala daerah dan wakilnya tak dapat dipungkiri bahwa banyak hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis.
- 3) Perlu mempertimbangkan kedudukan wakil kepala daerah. Dalam UUD NRI 1945 tidak pernah disebut secara eksplisit tentang keberadaan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan metode pengangkatan wakil kepala daerah yang akan diatur dengan suatu undang-undang khusus

5.2 Saran

- 1) Harus diamandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan tugas wakil kepala daerah.
- 2) Calon wakil kepala daerah ditentukan oleh calon kepala daerah terlepas dari pengaruh parpol. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengajukan seorang calon kepala daerah kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Dua ketentuan perlu diberlakukan pada pengajuan calon ini.
- 3) Undang-undang tentang pemilihan gubernur dan bupati/walikota sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum untuk mewujudkan pemerintah daerah yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dean, Jeffrey dkk. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta . Pustaka Pelajar
Offset. 2009
- Erliana hasan. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Refika
Aditama. 2005
- E. Kosasih Taruna Sepanji. Manajemen Pemerintahan Daerah Era Reformasi
Menuju Pembangunan Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Universal
2006
- Hariwijaya, Triton. Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi Dan Tesis
Jakarta Selatan.: Oryza 2011.
- I Gde Pantja Astawa. Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia.
Bandung. Alumni. 2009
- J.Kaloh. 2010a. Kepemimpinan Kepala Daerah.
Jakarta. Sinar Grafika
2010b. Mencari Bentuk Otonomi Daerah.
Jakarta . Rineka Cipta
- Kristian Widya Wicaksono. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah.
Yogyakarta. Graha Ilmu 2008
- Mardiasmo. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta. Penerbit Andi 2008.
- Moleong, J, Lexy. Metodologi penelitian kualitatif.
Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2007
- Ritha F. (2009). Peranan Manajemen Konflik Pada Suatu Oranisasi. diakses dari
www.e_konflik_pada_organisasi.com pada tanggal 20 november 2012
- Rosidin, Utang. Otonomi daerah dan desentralisasi.
Bandung. CV Pustaka Ceria 2010.
- Sastro, Wantu. Dkk. Transformasi Demokrasi Local Gorontalo.
Jakarta. PT Pustaka Indonesia Press. 2012
- Sucipto, Chahib Soleh. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah.
Bandung. Fokusmedia 2011.

Soemitro Rohmat. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah. Bandung. Eresco Tarate 2009.

Syafi'ie, Inu Kencana. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung. PT. Refika Aditama 2009.

Syamsuddin Haris. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPI Press 2007.

Jurnal Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah